



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
banasa

*Rencana Kerja (Renja)
Perubahan Tahun 2025*



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kota Dumai*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, berkat dan rahmat Allah SWT, Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai tahun 2025 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program, kegiatan dan sub kegiatan.

Isi dari rencana kerja ini lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Rencana Strategis priode 2025.

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus memanfaatkan secara efektif dan efesien, semua sumber daya yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* DPMPTSP Kota Dumai mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terekomendasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan.

Demikian Renja Perubahan ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2024 berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan menuju Dumai Kota Idaman.

Dumai, Juli 2025



HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian IKU Perangkat Daerah SAMPAI TW II	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Rencana Kerja	
BAB V PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah salah satu OPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. Dalam peraturan tersebut Bab IV Pasal 4 disebutkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Type A, melaksanakan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penugasan dan fungsi DPMPTSP diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. DPMPTSP membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyusaian perencanaan tahunan dalam rangka mengefektifkan anggaran yang ada dan percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Mengingat dokumen Renja OPD memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Dumai Tahun 2025, dan berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pntu Kota Dumai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dapat di ketahui beberapa kekurangan yang harus dilakukan perubahan dalam rangka perbaikan, maka perlu disusun sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang memuat Perubahan pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencakup penyesuaian pagu dan target Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;

27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan ke 4 Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
31. Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai;
32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai
33. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dan acuan dalam 1 Tahun.

2. Melakukan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada dalam rangka untuk mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran DPMPTSP.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;.
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024.

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan rancangan perubahan rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Sampai dengan Triwulan II)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN SATU.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra DPMPTSP. Renja juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periode. Terkait dengan hal tersebut, Renja Perubahan DPMPTSP Kota Dumai menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Dumai setelah evaluasi pelaksanaan Renja pada Triwulan I tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP tahun 2025 hingga triwulan I berjalan dengan cukup baik sesuai target. Dari total 6 (Enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, realisasinya masih dibawah 30% dilaksanakan sesuai dengan target rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran kas DPMPTSP Kota Dumai tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Triwulan I secara rinci sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 berikut :

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output))	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan (Data APBD Tahun 2024))								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal	500%	61.537.249.795	300%	18.371.078.727	100%	9.118.964.542	10,84%	988.393.261,00																								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	73 Dokumen	1.416.301.400	42 Dokumen	125.520.250	12 Dokumen	37.611.600																										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	11 Dokumen	91.391.250	7 Dokumen	19.265.850	2 Dokumen	4.360.000																										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	85.779.950	5 Dokumen	16.629.900	2 Dokumen	4.840.000																										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	82.748.900	5 Dokumen	14.753.300	2 Dokumen	4.450.000																										
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	828.999.500	5 Dokumen	15.513.800	2 Dokumen	4.450.000																										
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	96.346.750	5 Dokumen	5.361.200	2 Dokumen	6.528.000																										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	18 Laporan	126.610.150	10 Dokumen	26.596.400	4 Laporan	6.900.000																										
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	104.424.900	5 Dokumen	27.399.800	1 Laporan	6.083.600																										

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	6 Dokumen	30.139.050.033	6 Dokumen	10.464.016.200	4 Dokumen	5.547.101.193	12%	677.959.630								12,22%	677.959.630	3%	12%	12,22%	11.141.975.830	2,04%	36,97%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2700 Orang/Bulan	29.898.484.433	1620 Orang/Bulan	10.414.024.400	45 Orang/bulan	5.530.027.720	12%	677.959.630									12,26%	677.959.630	0%	12%	12,26%	11.091.984.030		37,10%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	46.648.000	2 Dokumen	9.999.800	1 Dokumen	2.150.652											0,00%	-	0%		0,00%	9.999.800		21,44%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	8 Dokumen	57.000.000	4 Dokumen	9.999.800	2 Dokumen	3.520.393											0,00%	-	0%		0,00%	9.999.800		17,54%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	9 Laporan	56.926.800	5 Dokumen	9.996.200	2 Laporan	3.913.717											0,00%	-	0%		0,00%	9.996.200		17,56%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	23 Laporan	40.004.300	9 Laporan	9.995.900	7 Laporan	3.395.527											0,00%	-	0%		0,00%	9.995.900		24,99%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	39.986.500	2 Dokumen	10.000.100	1 Dokumen	4.093.184											0,00%	-	0%		0,00%	10.000.100		25,01%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Dokumen	190.511.600	7 Dokumen	39.996.700	5 Laporan	24.596.112											0,00%	-	0%		0,00	39.996.700		20,99%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	45.836.600	5 Dokumen	9.999.200	2 Dokumen	4.538.264											0,00%	-	0%		0,00	9.999.200		21,81%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	56.678.000	3 Dokumen	9.999.000	1 Dokumen	9.549.024											0,00%	-	0%		0,00	9.999.000		17,64%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	9 Laporan	41.732.500	5 Laporan	9.999.500	2 Laporan	5.196.525											0,00%	-	0%		0,00	9.999.500		23,96%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	46.264.500	6 Laporan	9.999.000	2 Laporan	5.312.299											0,00%	-	0%		0,00	9.999.000		21,61%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen/ Laporan	2.050.000.000	4 Dokumen	57.917.000	50 orang	71.820.000											0,00%	-	0%	0%	0,00	57.917.000		2,83%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	270 Paket	450.000.000	126 Paket		90 paket	71.820.000											0,00%	-	0%		0,00	-		0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 Orang	600.000.000			25 Orang												0,00%	-	0%		0,00	-		0,00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	450.000.000			40 Orang												0,00%	-	0%		0,00	-		0,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45 Orang	550.000.000	25 Orang	57.917.000	20 orang												0,00%	-	0%		0,00	57.917.000		10,53%

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Dokumen/Laporan	6.813.855.675	7 Dokumen	1.730.943.197	12 bulan	551.212.077	4%	23.265.600					4,22%	23.265.600	0%	4%	4,22%	1.754.208.797		25,74%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	84 Paket	512.012.650	44 Paket	228.459.850	20 paket	50.710.500							0,00%	-	0%	0%	0,00%	228.459.850		44,62%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	352 Paket	889.798.100	182 Paket	303.816.300	85 paket	80.396.142							0,00%	-	0%	0%	0,00%	303.816.300		34,14%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	192 Paket	357.759.422	102 Paket	215.178.200	45 paket	99.412.136	23%	23.265.600					23,40%	23.265.600	1%	23%	23,40%	238.443.800		66,65%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	691.376.800	26 Paket	145.170.800	7 paket	32.510.800							0,00%	-	0%	0%	0,00%	145.170.800		21,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	76 Paket	858.230.100	44 Paket	291.932.200	16 paket	140.124.200							0,00%	-	0%	0%	0,00%	291.932.200		34,02%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	189.366.000	3 Dokumen	10.740.000	1 Dokumen	5.000.000							0,00%	-	0%	0%	0,00%	10.740.000		5,67%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	3315312603,00	3 Laporan	535.645.847	1 Laporan	143.058.299							0,00%	-	0%	0%	0,00%	535.645.847		16,16%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	377 Unit	7.435.346.910	72 Unit	1.342.040.000	76 unit	39.450.000							0,00%	-	0%	0%	0,00	1.342.040.000		18,05%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	125.208.000	1 Unit	125.208.000	1 unit								0,00%	-	0%		0,00	125.208.000		100,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	148 Unit	1.963.260.300	40 Paket	382.300.000	40 unit	12.900.000							0,00%	-	0%	0%	0,00	382.300.000		19,47%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	148 Unit	3.640.301.000	108 Paket	633.686.000	20 unit	26.550.000							0,00%	-	0%	0%	0,00	633.686.000		17,41%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	118 Unit	1.556.577.610	30 Unit	200.846.000	15 unit								0,00%	-	0%		0,00	200.846.000		12,90%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000			1 unit								0,00%	-	0%		0,00	-		0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Laporan	11.781.172.849	1 Dokumen	4.322.713.424	12 bulan	2.723.259.560	11%	287.168.031					10,55%	287.168.031	1%	11%	10,55%	4.609.881.455		39,13%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	5 Laporan	51.837.400	3 Laporan	5.850.000	1 Laporan	10.000.000							0,00%	-	0%		0,00%	5.850.000		11,29%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Laporan	6.011.799.311	3 Laporan	1.690.486.204	1 Laporan	1.400.000.000	8%	109.091.751					7,79%	109.091.751	8%	8%	7,79%	1.799.577.955		29,93%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	5.717.536.138	3 Laporan	2.626.377.220	1 Laporan	1.313.259.560	14%	178.076.280					13,56%	178.076.280	14%	14%	13,56%	2.804.453.500		49,05%		

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105 Unit	1.711.011.328	20 Unit	287.935.706	110 unit	123.914.000									0,00%	-	0%	0%	0,00	287.935.706	16,83%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	193.623.328	3 Unit	55.030.000	1 unit	9.500.000									0,00%	-	0%	0%	0,00%	55.030.000	28,42%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	614.698.000	18 Unit	113.943.544	6 unit	71.538.000									0,00%	-	0%	0%	0,00%	113.943.544	18,54%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya gedung kantor yang dipelihara	60 Unit	477.690.000	36 Unit	118.962.162	12 unit	42.876.000									0,00%	-	0%	0%	0,00%	118.962.162	24,90%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	375.000.000													0,00%	-			0,00%	-	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000													0,00%	-			0,00%	-	0,00%	
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	223,45%	4.025.945.200	40,26%	457.015.414	44,3 %	246.625.840									0,00%	-	0%	0%	0,40	457.015.414	18,02%	11,35%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Diberikan Fasilitas Kemudahan Pengembangan Investasi	9 Dokumen	1.670.000.000	45 Perusahaan	257.016.314	45 perusahaan	89.772.840									0,00%	-	0%	0%	0,00	257.016.314	15,39%	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Dokumen	770.000.000	1 Dokumen	257.016.314	1 Dokumen	41.248.000									0,00%	-	0%	0%	0,00	257.016.314	33,38%	
	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota							24.091.500									0,00%	-			0,00	-		
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	45 Dokumen	900.000.000			15 Dokumen	24.433.340									0,00%	-	0%	0%	0,00	-	0,00%	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil potensi investasi di kota Dumai yang disediakan	7 Dokumen	2.355.945.200	2 Dokumen	199.999.100	1 Dokumen	156.853.000									0,00%	-	0%	0%	0,00	199.999.100	8,49%	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan(perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	1.200.935.200	1 Dokumen	99.999.600	1 dokumen	94.504.200									0,00%	-	0%	0%	0,00	99.999.600	8,33%	
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		4 Daerah					24.363.000									0,00%	-			0,00	-		
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	5 Dokumen	1.155.010.000	1 Dokumen	99.999.500	1 dokumen	37.985.800									0,00%	-	0%	0%	0,00	99.999.500	8,66%	

	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi/Investasi	50%	3.059.548.950	10%	203.843.640	10 %	144.184.100									0,00%	-	0%	0%	0,10	203.843.640	20,00%	6,66%		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi	9 Dokumen	3.059.548.950	1 Laporan	203.843.640	1 Laporan	144.184.100									0,00%	-	0%	0%	0,00	203.843.640		6,66%		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	5 Dokumen	2.439.389.800	3 Dokumen	203.843.640	1 dokumen	79.851.600									0,00%	-	0%	0%	0,00	203.843.640		8,36%		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	620.159.150			1 dokumen	64.332.500									0,00%	-	0%	0%	0,00	-		0,00%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN	500%	4.334.346.318	85%	268.010.285	85 %	88.290.540									0,00%	-	0%	0%	0,85	268.010.285	17,00%	6,18%		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	5510 Izin	4.334.346.318	1200 Izin	268.010.285	1600 Izin	88.290.540									0,00%	-	0%	0%	0,00	268.010.285		6,18%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	45 Dokumen	900.000.000			15 dokumen	-									0,00%	-	0%	#DIV/0!	0,00	-		0,00%		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	2400 Pelaku Usaha	1.258.072.000	1600 Pelaku Usaha	76.701.278	500 pelaku usaha	27.424.215									0,00%	-	0%	0%	0,00	76.701.278		6,10%		
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	66 Pelaku Usaha	1.276.274.318	7 Pelaku Usaha	91.076.707	15 pelaku usaha	36.086.325									0,00%	-	0%	0%	0,00	91.076.707		7,14%		
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	45 Dokumen	900.000.000	35 Dokumen	100.232.300	40 kegiatan usaha	24.780.000									0,00%	-	0%	0%	0,00	100.232.300		11,14%		

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimaksud, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD tahun 2016-2021 dan Renstra 2021-2026, meliputi

- (a). Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA),
- (b) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA),
- (c) Indeks kepuasan masyarakat.

Pencapaian kinerja sesuai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1.	Laju pertumbuhan nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			3,36	4,7	4,8	5,04	1,75	4,5	4,8	5,04	
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	-	1 Perusahaan	1 Perusahaan-	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	
3.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA) (Rp/Triliun)	-	✓	9.450.000.000.000	10.500.000.000.000	11.550.000.000.000	12.705.000.000.000	3.386.922.760.000	10.224.124.528.217	11.550.000.000.000	12.705.000.000.000	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			85,44	85,65	85,87	86,1	95,4	89,5	85,87	86,1	
5.	Mutu Pelayanan (Kategori)	-	-	B	B	B	B	A	B	B	B	

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dijelaskan bahwa DPMPPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Tugas tersebut termasuk diantaranya menyelenggarakan pemberian perizinan dan/atau rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum, melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan aktivitas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, DPMPPTSP Kota Dumai dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, dikemukakan beberapa permasalahan yang perlu diatasi pada Tabel 2.3.a sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kegiatan

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih rendahnya minat investor berinvestasi di Kota Dumai;	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya promosi investasi yang ditandai belum meratanya penyebaran informasi mengenai potensi atau peluang investasi di Kota Dumai. - Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Data profil peluang investasi belum diperbarui (<i>update</i>) - Belum tersedianya <i>Master Plan</i> Investasi - Belum tersedianya regulasi mengenai kemudahan berinvestasi
2.	Menurunnya jumlah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Dumai;	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang kondusifnya iklim investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung yang masih minim - Inkonsistensi regulasi

3.	Menurunnya kontribusi investasi terhadap PDRB;	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan investasi yang masih cenderung berfluktuasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya system pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan investasi - Terbatasnya personil untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan investasi
4.	Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi - Data dan informasi yang dipublikasi dan dikelola belum dilakukan dengan maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan kuantitas petugas pelayanan yang belum memadai - Keterbatasan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dibidang teknologi guna pengoperasian system pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dan pengelolaan, pengolahan serta penyajian data dan infomasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang dapat mempengaruhi pencapaian dalam perencanaan pembangunan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2.3.b sebagai berikut :

Tabel 2.3

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Visi, Misi dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, serta penuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Terhambatnya penerbitan izin di bidang penanaman modal lainnya yang berhubungan dengan OPD teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan dan kompetensi SDM yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoptimalisasian industry, perdagangan dan jasa serta pemanfaatan peluang investasi setelah

kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya)			penetapan Kota Dumai menjadi beberapa pusat kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah Pusat dan Provinsi
- Terbatasnya sumber daya aparatur pelayanan dan penanaman Modal	- Masih tingginya tanggapan masyarakat mengenai sulitnya pengurusan Perizinan dan Non Perizinan	- Peran pengawasan dalam melakukan kendali terhadap penyelenggaraan prosedur pelayanan terpadu satu pintu dan ketentuan yang berlaku	- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung
- Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam proses pelayanan perizinan	- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dalam mengurus perizinan dan non perizinan dalam melakukan berusaha	- Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan sosialisai	- Penggalian dan kajian potensi investasi daerah
- Belum tersusunnya kajian mengenai potensi yang dimiliki dan rencana umum penanaman modal yang komprehensif	- Belum Meratanya Penyebaran informasi Potensi Investasi di Kota Dumai dikalangan masyarakat/investor	- Kemampuan dan kompetensi SDM yang memadai mengenai penanaman modal	Letak geografis Kota Dumai yang berada di alur pelayaran internasional

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan DPMPTSP tahunan yang berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi DPMPTSP Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan DPMPTSP dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian target dan sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja DPMPTSP tahun 2025, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran dengan adanya penambahan sub kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran pada Renja tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran DPMPTSP Kota Dumai sehingga target dan sasaran dapat tercapai.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yaitu meningkatkan pertumbuhan investasi dan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam mewujudkan masyarakat Kota Dumai yang semakin sejahtera melalui sasaran meningkatnya investor di Kota Dumai, Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai dan Meningkatnya kualitas pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan yang tercermin dengan meningkatnya jumlah investor/perusahaan baru berskala nasional baik itu PMDN maupun PMA yang masuk ke Kota Dumai yang secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah

nilai investasi berskala nasional baik itu PMDN maupun PMA yang menggambarkan bahwa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai merencanakan anggaran untuk 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 51 (Lima puluh satu) sub kegiatan dengan total dana pagu indikatif sebesar Rp. 9.729.941.724,- (Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Adapun program dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH																				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI																				
TAHUN 2025																				
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									14.118.110.606	9.729.941.724	9.729.941.724								19.685.999.176,00	
2									14.118.110.606	9.729.941.724	9.729.941.724								19.685.999.176,00	
2	18								14.118.110.606	9.729.941.724	9.729.941.724								19.685.999.176,00	
2	18	01																	13.996.704.852,00	
2	18	01	2.01																	
2	18	01	2.01	0001																
2	18	01	2.01	0002																
2	18	01	2.01	0003																
2	18	01	2.01	0004																
2	18	01	2.01	0005																
2	18	01	2.01	0006																
2	18	01	2.01	0007																

2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.547.643.223	5.547.101.193	5.548.101.193						ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.785.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																7.700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.500.000.000	5.530.027.720	5.531.027.720		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	9.361.101	2.150.652	2.150.652		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.166.945	3.520.393	3.520.393		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.996.808	3.913.717	3.913.717		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	9.146.422	3.395.527	3.395.527		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	9.971.947	4.093.184	4.093.184		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7 Dokumen/Laporan	7 Dokumen/Laporan	37.572.732	24.596.112	24.596.112						ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.705.366	4.538.264	4.538.264		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.930.747	9.549.024	9.549.024		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.993.747	5.196.525	5.196.525		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.942.872	5.312.299	5.312.299		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah				50 Orang	120 Orang	200.000.000	71.820.000	71.820.000						ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	120 Paket	50.000.000	71.820.000	71.820.000		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	50.000.000	0	0		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	50.000.000	0	0		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	50.000.000	0	0		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	3 Laporan	3.210.000.000	2.723.259.560	2.722.259.560					ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	905.704.852,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15.704.852,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1.400.000.000	1.400.000.000	1.399.000.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1.800.000.000	1.313.259.560	1.313.259.560	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				640.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			20 Unit	19 Unit	262.050.000	123.914.000	123.914.000					ASN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	339.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	19.000.000	9.500.000	9.500.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				39.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	6 Unit	93.460.000	71.538.000	71.538.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	99.590.000	42.876.000	42.876.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0	50.000.000	0	0	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Jumlah proyek investasi			48,71%	48,71%	1.350.000.000	246.625.840	246.625.840							1.400.000.000,00	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diberikan fasilitas kemudahan pengembangan investasi			1 Perusahaan	3 Dokumen	300.000.000	89.772.840	89.772.840		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLUHAN	Masyarakat Kota Dumai	700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	41.248.000	41.248.000	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLUHAN		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	24.091.500	24.091.500	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	24.433.340	24.433.340	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLUHAN		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil potensi investasi di Kota Dumai yang disediakan														Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai			700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2	18	02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																					300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi																									
2	18	02	02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																									
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investor terhadap peningkatan investasi																							1.000.000.000,00			
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Investasi																							1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	03	02	0001	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota																							700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	03	02	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota																								300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan																								1.500.000.000,00		
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/	Jumlah Izin Yang Diterbitkan																								1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota																								300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																								400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																								400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha																								400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN				100 %	100 %	600.000.000	121.207.702	121.207.702						1.500.000.000,00		
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengendalian penanaman modal				75 Pelaku Usaha	58 Pelaku Usaha	600.000.000	121.207.702	121.207.702		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				15 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	200.000.000	38.435.500	38.435.500		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	200.000.000	41.765.302	41.765.302		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLUBHUANAN		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspekti Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	200.000.000	41.006.900	41.006.900		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLUBHUANAN		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi				100 %	100 %	100.000.000	10.669.000	10.669.000							289.294.324,00	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku statistik penanaman modal Kota Dumai			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	10.669.000	10.669.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai		289.294.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	10.669.000	10.669.000		Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		289.294.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					JUMLAH						14.118.110.606	9.729.941.724	9.729.941.724								

BAB IV


PENUTUP

Rancanangan Awal Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Dumai Tahun 2025. Dan dari hasil evaluasi yang kami lakukan dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk beberapa program dan kegiatan dianggap perlu penambahan pagu anggaran mengingat program dan kegiatan tersebut merupakan penting dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.
2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 berdasarkan atau mengacu pada peraturan perundang-undangan atau kaidah – kaidah yang berlaku.
3. Diperlukan Upaya-upaya perbaikan kinerja dalam rangka peningkatan out put dari program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 DPMPTSP Kota Dumai

Besar Harapan kami dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, menjadi acuan Pemerintah Kota Dumai dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan anggaran DPMPTSP terkait pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 DPMPTSP Kota Dumai.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini kami susun semoga sinergiritas yang terjalin selama ini dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi dimasa kedepan dalam mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Idaman.

Dumai, Juli 2025
 KEPALA,

 HENDRA S. Sos., M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660724 198602 1 002